

# Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional



Lokakarya Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Universitas Katolik Parahyangan  
Papandayan Hotel-Bandung, 20 November 2015



# SERTIFIKAT

diberikan kepada :

*Dr. Dadang Solihin*

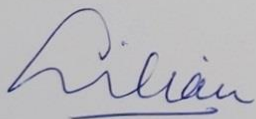
Atas perannya sebagai :

**Narasumber**

dalam Lokakarya Kurikulum "**Materi Bisnis & Manajemen**" yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan pada tanggal 20 November 2015 di Hotel Papandayan Bandung

Bandung, 20 November 2015

Kaprodi Ekonomi Pembangunan,

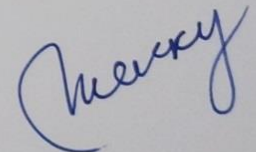


**Dr. Miryam L. Wijaya**

[dadang-solihin.blogspot.com](http://dadang-solihin.blogspot.com)



Dekan Fakultas Ekonomi,



**Dr. Maria Merry Marjanti**



## DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com) HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

# Materi

- Visi Program Studi Ekonomi Pembangunan
- 23 Atribut Soft Skills yang Dominan Dibutuhkan di Lapangan Kerja
- Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
- Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Permasalahan Investasi yang Ditemukan
- Strategi Peningkatan Investasi Daerah





# Visi

## Program Studi Ekonomi Pembangunan

- Menjadi komunitas akademik ilmu ekonomi, yang humanum dan bersemangat kasih dalam kebenaran, **yang mengembangkan potensi lokal ke tataran internasional** demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan,
- berdasarkan sesanti *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti* yang berarti "Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat".

# KOMUNITAS AKADEMIK ILMU EKONOMI

# MENGEMBANGKAN POTENSI LOKAL KE TATARAN INTERNASIONAL

- 1. Kompetensi** apa saja yang seharusnya dimiliki seorang lulusan Prodi EP
  - Untuk dapat berkarier di perusahaan (bisnis)?
  - Ingin berkarier di organisasi nirlaba?
- 2. Pengetahuan** apa saja yang diperlukan dalam rangka membangun kompetensi tersebut?
- 3. Ketrampilan** dan **sikap** seperti apa yang perlu dilatihkan?

## BIDANG KAJIAN

1. Ekonomi Moneter dan Keuangan (EMK)
2. Ekonomi Kawasan dan Lingkungan (EKL)
3. Ekonomi Industri dan Perdagangan (EIP)



**PENINGKATAN  
MARTABAT  
MANUSIA  
DAN  
KEUTUHAN  
ALAM  
CIPTAAN**

**KETRAMPILAN**

**HARD SKILLS**

**KURIKULUM**

**SERTIFIKASI**

**HUMANUM DAN BERSEMANGAT  
KASIH DALAM KEBENARAN**

**SIKAP**

**SOFT SKILLS**

**BAKUNING HYANG MRIH GUNA SANTYAYA BHAKTI**

# 23 Atribut *Soft Skills* yang Dominan Dibutuhkan di Lapangan Kerja

1. Inisiatif
2. Etika/ integritas
3. Berfikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif.
11. Kemampuan analitis

12. Dapat mengatasi stress
13. Manajemen diri
14. Menyelesaikan persoalan
15. Dapat meringkas/mengabstraksi
16. Bekerjasama
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumen logis
23. Manajemen waktu.

- Hasil survey di USA, Canada, dan UK.
- **Sumber** : (Center for Entrepreneurship Education and Development, Halifax, Nova scotia, 2004).





# Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

## CHANGI CREATIVITY



# MEA 2015

- Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT pada Desember **1997** di Kuala Lumpur.
- Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.
- Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober **2003**, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun **2015**.
- Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN.
- ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

# Fokus MEA 2015

## 1. Asia Tenggara dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi.

- Arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan **skilled labour** menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

## 2. MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi.

- Memerlukan suatu kebijakan yang meliputi **Competition Policy, Consumer Protection, Intellectual Property Rights, Taxation, dan E-Commerce.**
- Dapat tercipta iklim persaingan yang adil;
- Perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen;
- Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta;
- Menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi;
- Menghilangkan sistem Double Taxation,
- Meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

# Fokus MEA 2015

- 3. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan UKM.**
  - Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.
- 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota.**
  - Akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang.
  - Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

# Hambatan Indonesia Menghadapi MEA 2015

- 1. Mutu pendidikan tenaga kerja** masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64% dari total 118 juta pekerja di Indonesia.
- 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.
- 3. Sektor industri yang rapuh** karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi.
- 4. Keterbatasan pasokan energi.**
- 5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor**, terutama produk Tiongkok.

# Semua Bersaing di MEA 2015

- Setiap wilayah di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama wilayah di dalam negeri namun dengan wilayah-wilayah lain di dunia.
  - Sebagai contoh petani di Sidrap Sulawesi Selatan sebenarnya bersaing dengan petani di kabupaten-kabupaten negara Laos, Vietnam, atau Kamboja.
  - Dalam hal ini yang bersaing adalah petaninya, bukan negaranya ataupun pemerintahannya.
- Demikian juga dengan Mahasiswa/i, sarjana, kaum profesional, peneliti, dll. Semuanya bersaing



# Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat

# INVESTASI

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang.

Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.

Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil.

Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama **meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut.**



# Analisis Potensi PAD

1. Kenali setiap jenis Pajak Daerah,
2. Kenali setiap jenis Retribusi Daerah,
3. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Pajak Daerah tersebut,
4. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Retribusi Daerah (kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan),
5. Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.



## PEMBANGUNAN DAERAH



## PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

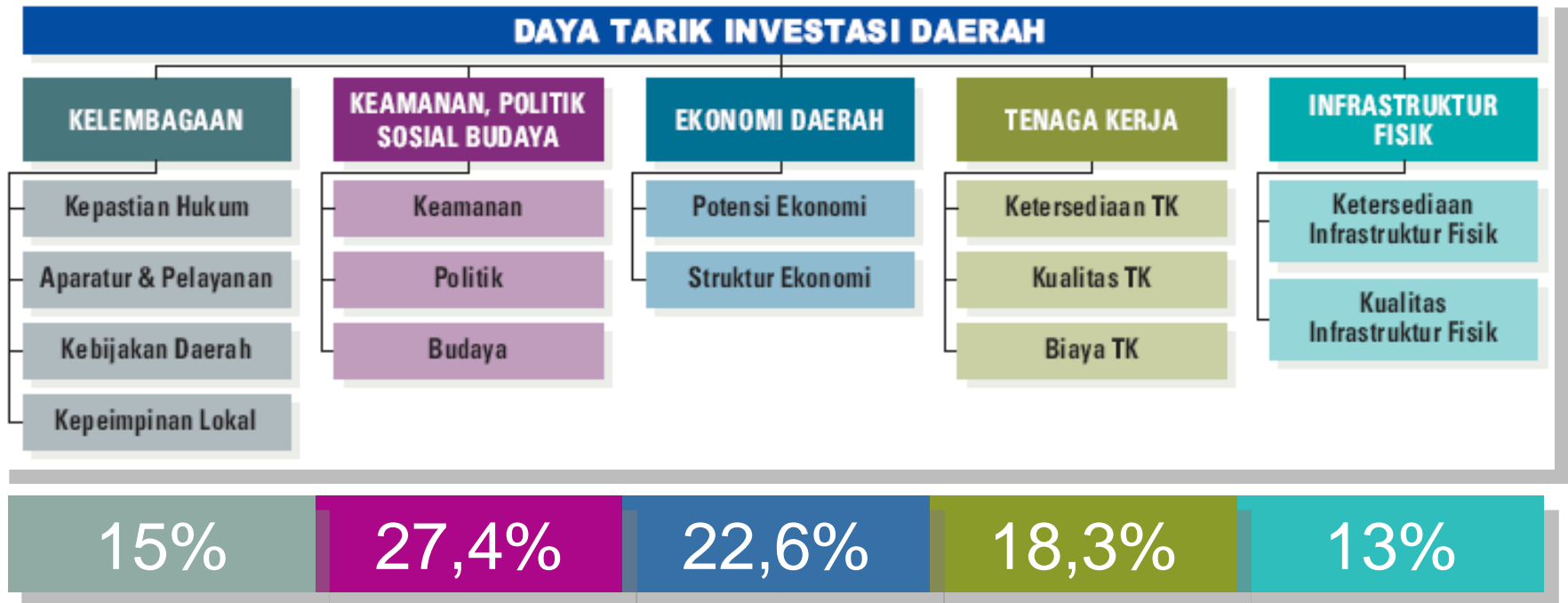


Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

# Daya Tarik Investasi Daerah

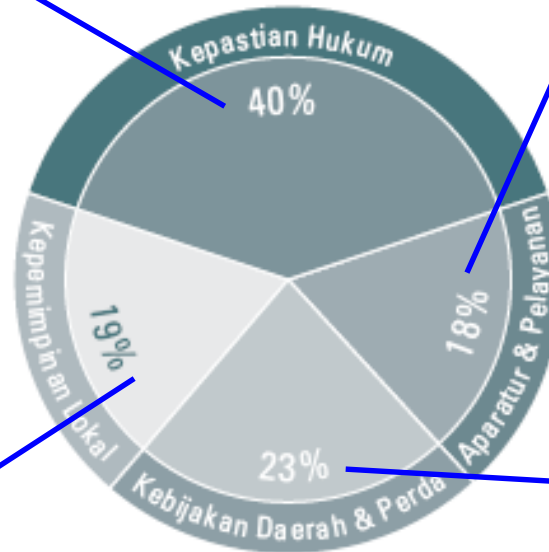


Sumber: KPPOD, 2005

# Kelembagaan (15%)

## Kepastian Hukum

- Konsistensi Peraturan
- Penegakan Keputusan Peradilan
- Kecepatan Aparat Keamanan
- Pungutan Liar di Luar Birokrasi



## Aparatur dan Pelayanan

- Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha
- Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha
- Informasi Potensi Ekonomi Daerah
- Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat

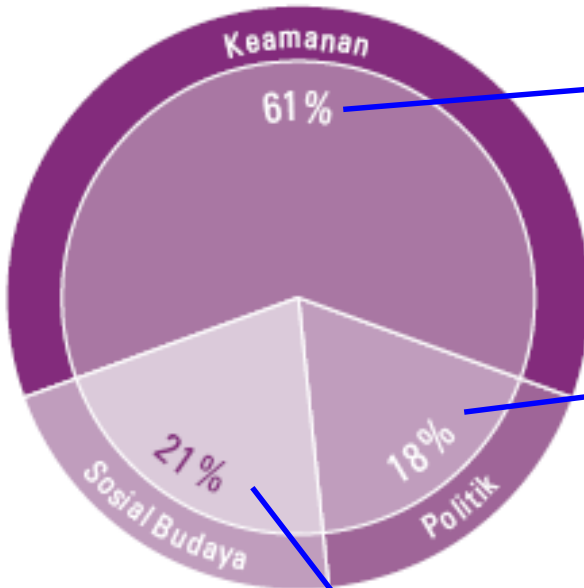
## Kepemimpinan Lokal

- Kepemimpinan Kepala Daerah
- Inisiatif Kepala Daerah
- Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha

## Kebijakan Daerah dan Perda

- Kejelasan Tarif
- Kejelasan Prosedur
- Proses Perumusan Perda
- Kebijakan Ketenagakerjaan

# Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%)



## Keamanan

- Keamanan Usaha
- Keamanan Masyarakat
- Dampak Unjuk Rasa

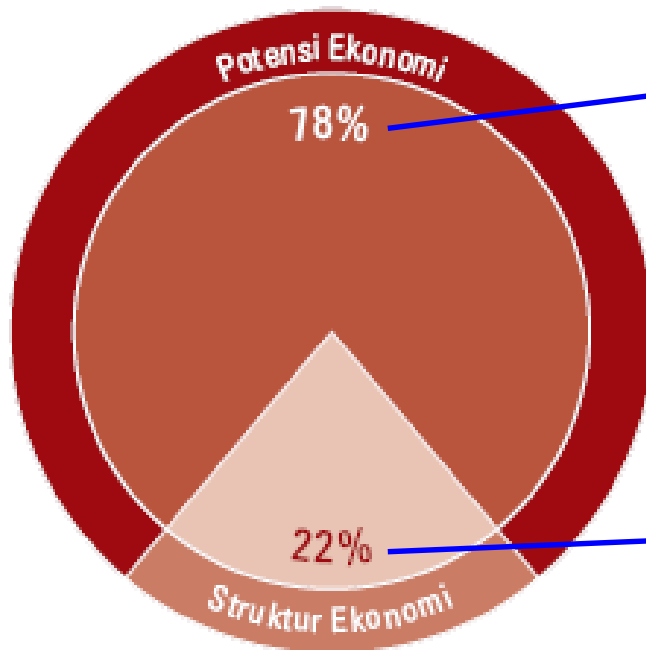
## Politik

- Hubungan Eksekutif-Legislatif
- Hubungan antar Partai Politik

## Sosial Budaya

- Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
- Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
- Etos Kerja Masyarakat
- Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
- Potensi Konflik di Masyarakat

# Ekonomi Daerah (22,6%)



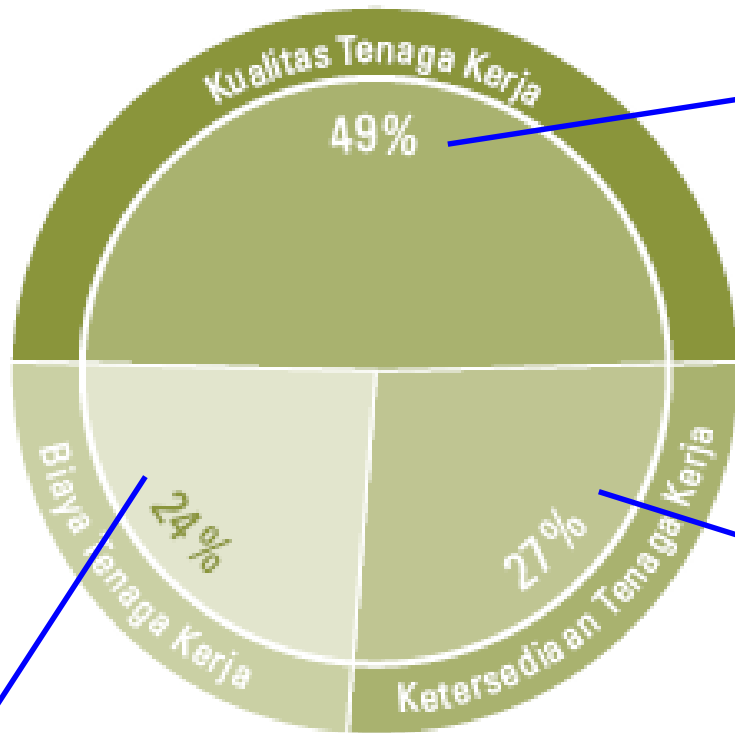
## Potensi Ekonomi

- PDRB Perkapita
- Pertumbuhan Ekonomi
- Indeks Kemahalan Konstruksi

## Struktur Ekonomi

- Pertumbuhan Sektor Primer
- Pertumbuhan Sektor Sekunder
- Pertumbuhan Sektor Tersier

# Tenaga Kerja (18,3%)



## Kualitas Tenaga Kerja

- Produktivitas Tenaga Kerja
- Pendidikan Tenaga Kerja

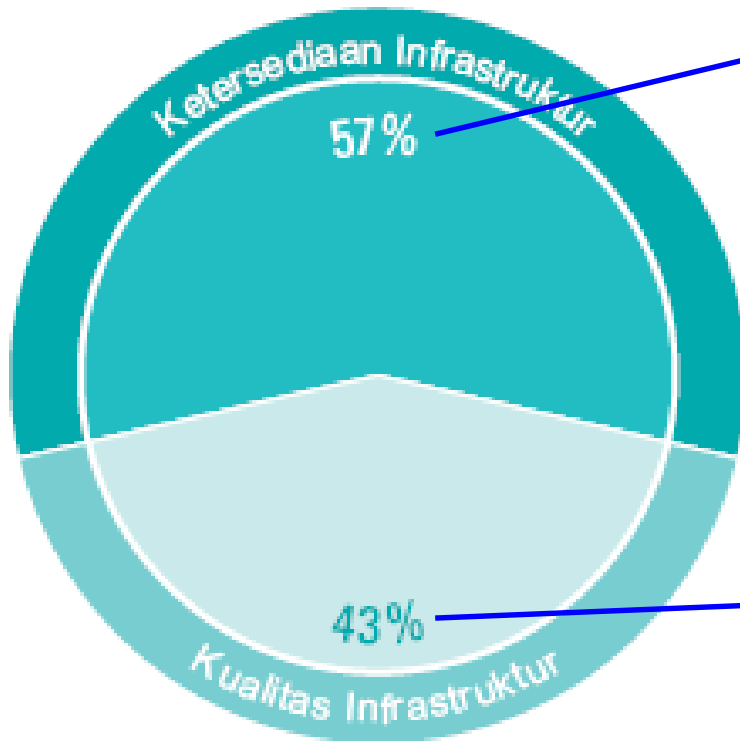
## Ketersediaan Tenaga Kerja

- Tenaga Kerja Usia Produktif
- Tenaga Kerja Pencari Kerja

## Biaya Tenaga Kerja

- Biaya Tenaga Kerja Formal
- Biaya Tenaga Kerja Aktual

# Infrastruktur Fisik (13%)



## Ketersediaan Infrastruktur Fisik

- Ketersediaan Jalan Darat
- Ketersediaan Pelabuhan Laut
- Ketersediaan Pelabuhan Udara
- Ketersediaan Sambungan Telepon
- Ketersediaan Supply Listrik

## Kualitas Infrastruktur Fisik

- Kualitas Jalan Darat
- Kualitas Pelabuhan Laut
- Kualitas Pelabuhan Udara
- Kualitas Sambungan Telepon
- Kualitas Tegangan Listrik



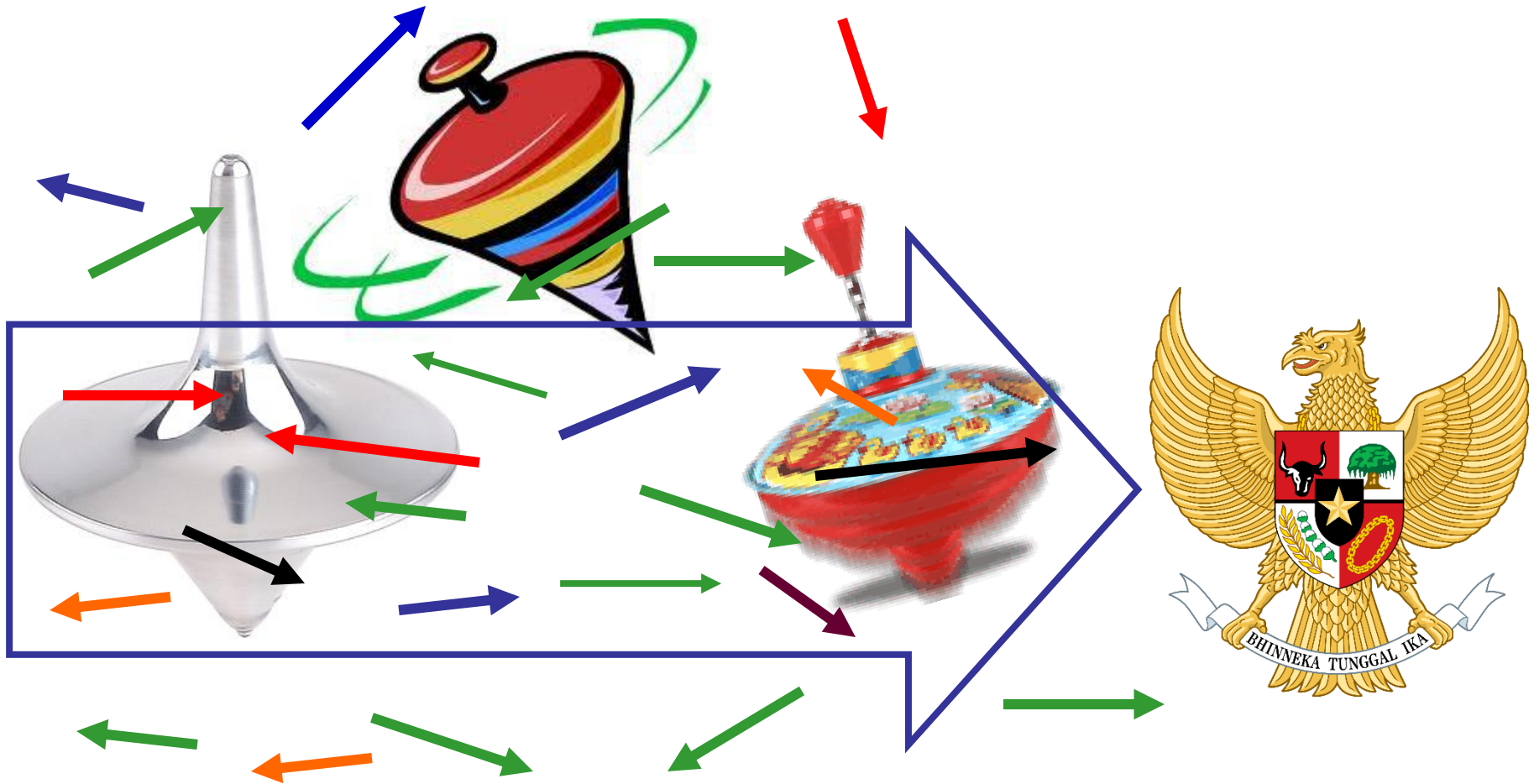


# Permasalahan Investasi yang Ditemukan

...ing abnormality is fixing /  
improving abnormality  
Prevent Breakdowns and Off Quality

Jahs Hwaan - Shop 3  
• Remove Perced deterioration  
• Identify abnormalities  
• Evaluate Necessary / unnecessary  
• Identify Sources of commission  
• Develop capability to identify

# Sinergi dan Koordinasi



# What are problems in Indonesia for foreign investors?

- Business-unfriendly labor disputes,
- Relatively bad socio-political image,
- Sharp increase of wages in the past years with labor productivity kept low,
- Rampant KKN including non-transparent legal/ judicial system,
- Confusion related to the 'decentralization' policies,
- Deteriorating social infrastructure.



# Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia?

- Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes → China, Thailand, Malaysia
- Bigger Market Potential by entrance to WTO → China
- Good Social Infrastructure → Singapore, Malaysia, China, Thailand
- Better Rule of Law → Singapore, Malaysia, Thailand
- Quickly Expanding Industrial Clusters → China, Thailand (esp. auto-related industries), Malaysia
- Qualified Human Capital → China, India, Singapore, Vietnam

# All measures should be done at the same time

- To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI.
- To improve labor issues and taxation.
- To improve social security
- To strengthen law and order including judicial reform.
- To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces
- To improve and set up social infrastructure
- To make ministers a good single team
- **Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above**

# Ketidakpastian Investasi di Daerah

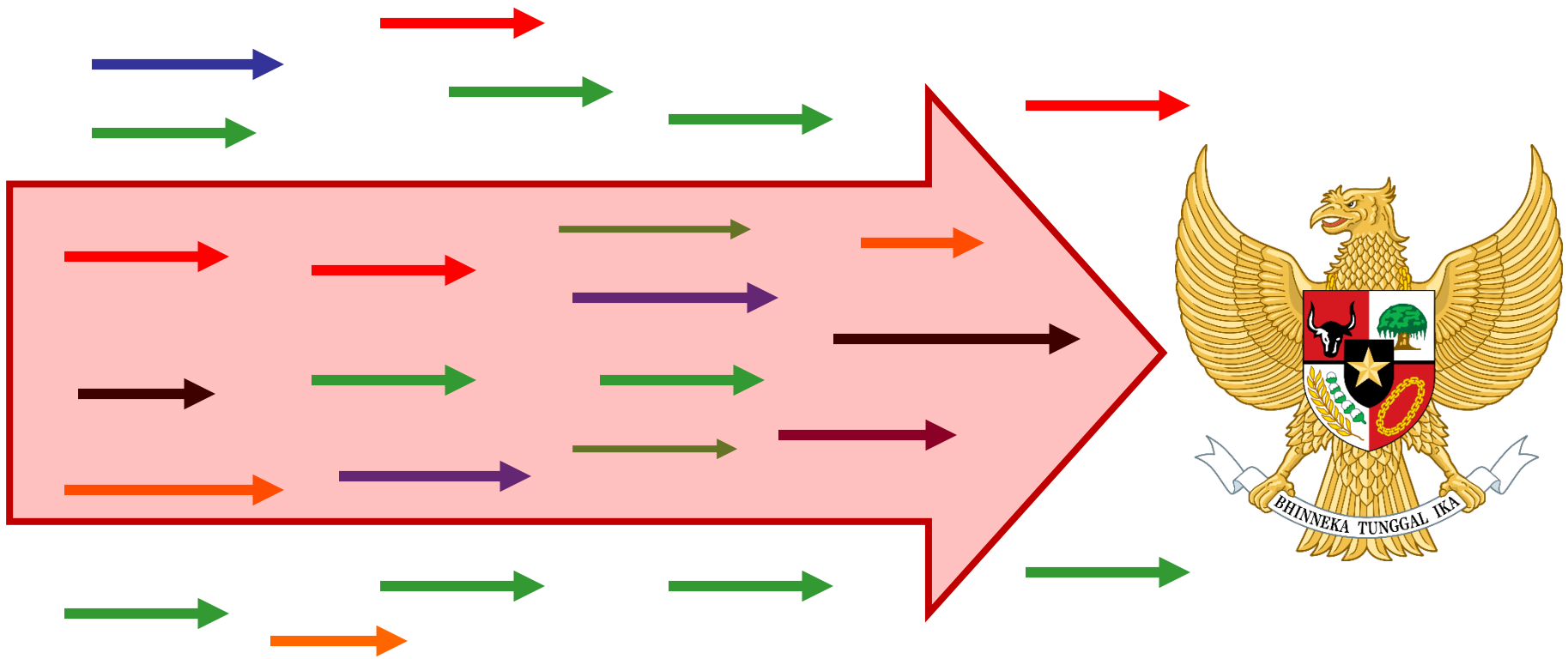
- Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda distortif,
- Penyusunan Perda tidak partisipatif,
- Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industry,
- Perebutan aset usaha di daerah,
- Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah,
- Konflik pada usaha berbasis lahan luas,
- Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.),



# Strategi Peningkatan Investasi Daerah



# Sinergi *Stakeholders*





# Three BKPM's Priorities

1

**Improvements of Licensing:**

Faster, Simpler, Transparent & Integrated

2

**Debottlenecking of Investment Realization**

3

**Development of Investment Climate**

Source: BKPMN 2015

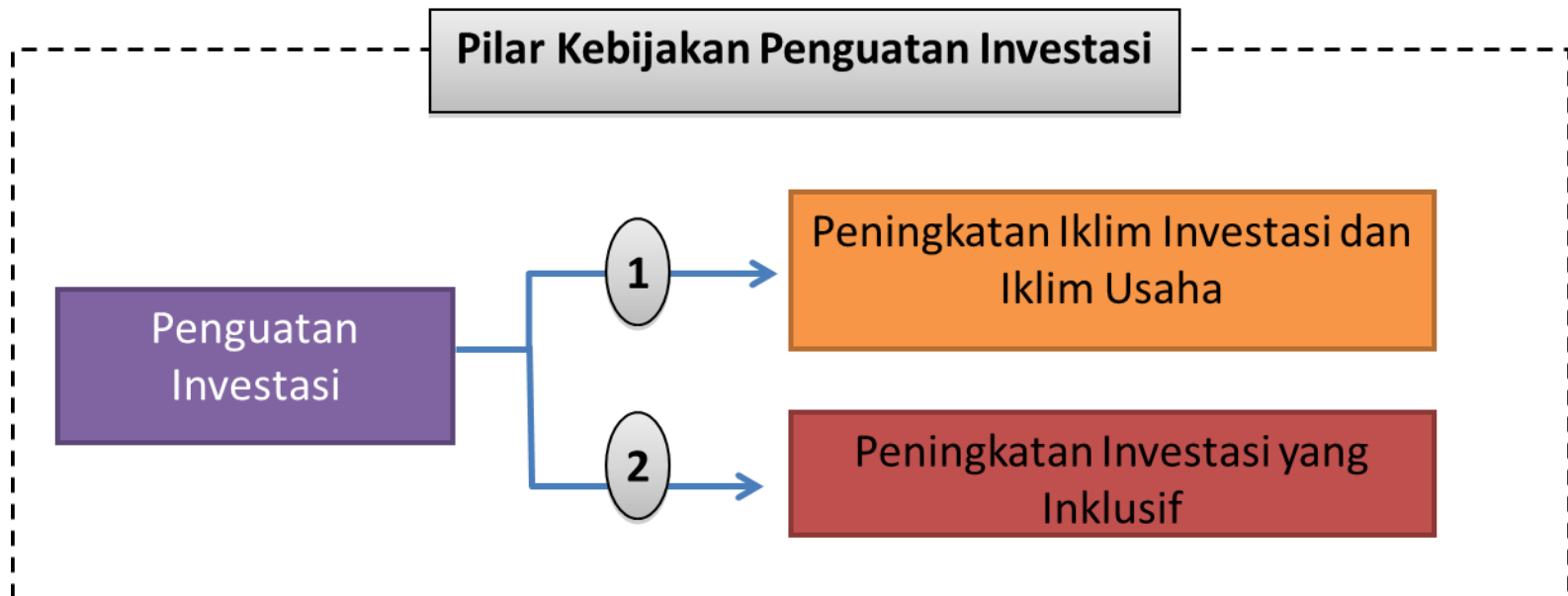
# Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Triliun)

Wilayah	Perkiraan 2014	Proyeksi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>NASIONAL</b>	<b>456.6</b>	<b>519.5</b>	<b>594.8</b>	<b>678.8</b>	<b>792.5</b>	<b>933.0</b>
Jawa	263.7	282.6	302.6	317.5	337.6	354.5
Sumatera	63.0	75.2	90.2	108.0	132.2	163.1
Kalimantan	62.9	74.5	88.8	105.4	128.1	156.9
Sulawesi	20.4	27.8	38.1	52.0	72.7	102.6
Bali dan Nusa Tenggara	14.7	19.0	24.9	32.4	43.2	58.1
Maluku	4.8	7.3	9.5	13.6	16.1	18.7
Papua	27.2	33.2	40.8	50.0	62.6	79.1

Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015

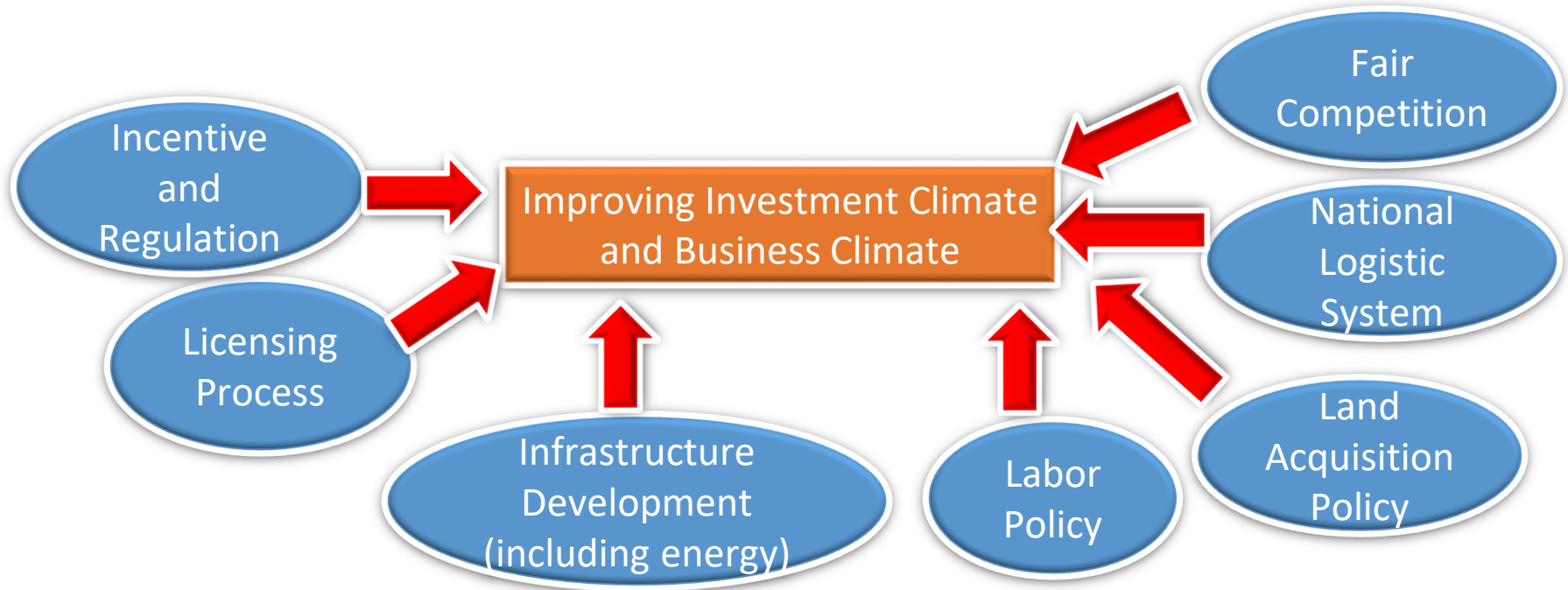
# Arah Kebijakan Investasi Nasional

- Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:
  1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan **efisiensi proses perijinan bisnis**;
  2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari **investor domestik**.
- Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.



# Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

- Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat:
  1. Meningkatkan efisiensi proses perijinan,
  2. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta
  3. Mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.



## Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif

- Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.



# Strategi Peningkatan Investasi Daerah

1. **Deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan** yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui:
  - a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi,
  - b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga,
  - c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan
  - d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

# Strategi Peningkatan Investasi Daerah

2. **Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha** di Kawasan Strategis, melalui:
  - a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis,
  - b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah,
  - c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah kepada kepala PTSP,
  - d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis,
  - e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis,
  - f. Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis,
  - g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan
  - h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

# Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi

- Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
- Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan *free internal trade principle*).
- Tidak mengakibatkan pungutan berganda (*Double Taxation*) dengan Pajak Pusat (PPH, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
- Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis).
- Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
- Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.



# Strategi Daerah dalam Menarik Investasi

1. Identifikasi potensi ekonomi daerah
2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
3. Pelayanan investasi satu atap
4. Pengembangan situs potensi daerah
5. Keikutsertaan dalam pameran investasi
6. Studi banding pelayanan investasi
7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
8. Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah
9. Menynergikan peluang dan kebijakan antar daerah
10. Membangun prasarana dasar dan SDM
11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal
12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah
13. Kesiediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah

A close-up photograph of a person's hands holding a white tablet. The tablet screen displays a business dashboard with various charts, including a bar chart and a pie chart, all in shades of blue. The text "Terima Kasih" is overlaid in large, white, bold letters with a black outline across the center of the screen. The background is blurred, showing a person in a light blue shirt.

**Terima Kasih**